

Globalisasi Mengubah Konsep Negara, Teritori, Kedaulatan : Integrasi ALBA sebagai *Sovereignty Counter-Balance*

Wahyuni Andike¹, Siti R Susanto²

¹²Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Airlangga

¹wahyuni.andike2018@fisip.unair.ac.id, ²siti.susanto@fisip.unair.ac.id

Abstract

Globalization as a dynamic process has contributed to change and downgrade the power of. Most state experience various development regarding cross-border interaction, such as in economy, politics, and culture. Although the Westphalia Treaty of 1648 was a turning point where loyalty of people must be given to the state yet it is shown that the power of state does no longer exist as the only political power. Venezuela's Populist economic policies under Nicolas Maduro considered as failed state management which lead the country reaching equitable welfare. Regarding Venezuela from the start in the ALBA (the Bolivarian Alliance for the peoples of our America), it has been able to help a little compilation of this country to improve the crisis, asking that the ALBA here try to be seen as "Sovereignty Counter-Balance". Domestic problems that continue to make the Venezuelan exodus abroad. This national crisis and massive migration have had international implications. And the countries that have helped overcome this are Ecuador and Colombia. This paper examines the interrelationship between the causes of the Venezuelan crisis and its consequences, as well as the reactions of other countries. In this paper the author analyzes and explains the link between the Venezuelan crisis and its effects, as well as the reactions, attitudes and role of neighboring countries in this case Ecuador and Colombia. The purpose of this study was to find out how ALBA was able to maintain the harmony and position of domestic interdependence by not eliminating the existence and authority of member states. This writing uses qualitative descriptive methods with data collection using literature studies. After reviewing, analyzing some literature concluded that ALBA can be a catalyst for Latin America to strengthen relations and unite views in the face of such dynamic global problems.

Keywords : *ALBA Sovereignty; Migrant; Venezuela Crisis; Ecuador; Colombia*

Abstrak

Proses globalisasi telah berkontribusi terhadap perubahan dan menurunnya otoritas kekuatan dan kedaulatan suatu negara, di mana itu jelas terlihat dalam pola interaksi Negara tersebut yang sifatnya lintas batas, baik secara ekonomi, sosial, budaya dan politik. Perjanjian Westphalia 1648 yang awalnya menjadi titik balik loyalitas masyarakat terhadap negara, akhirnya mengalami perubahan signifikan sejak proses globalisasi terjadi awal abad 21. Fenomena itu salah satunya bisa dilihat dari Venezuela di era Nicolas Maduro. Kebijakan finansial populis tanpa adanya pertimbangan bagaimana mengelola negara yang baik telah membuat Venezuelasebagai negeri kaya minyak gagal mencapai pemerataan kesejahteraan. Keterlibatan Venezuela sejak awal dalam mendirikan ALBA (Bolivarian Alliance for the peoples of our America) adalah sangat terbantu ketika negara ini mengalami kondisi krisis. keberadaan ALBA disini coba dilihat sebagai "*Sovereignty Counter-Balance*". permasalahan domestik yang terus berlangsung membuat warga negara Venezuela eksodus ke negara jiran. Krisis nasional yang dikuti dengan migrasi masif ini menimbulkan implikasi yang bagi dunia internasional. Negara yang berupaya membantu permasalahan ini adalah Ekuador dan Kolombia. Dalam tulisan ini penulis menganalisis dan menjelaskan keterkaitan antara krisis Venezuela dan efeknya, serta reaksi, sikap dan peran negara tetangga yang dalam hal ini

Ekuador dan Kolombia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana ALBA mampu menjaga harmoni dan kedudukan interdependensi domestic dengan tidak menghilangkan eksistensi dan otoritas negara anggota. Penulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan studi literatur. Setelah meninjau, menganalisa beberapa literatur disimpulkan bahwa ALBA mampu menjadi katalis bagi Amerika Latin memperkuat relasi dan menyatukan pandangan dalam menghadapi permasalahan global yang begitu dinamis.

Kata Kunci : Kedaulatan ALBA; Migran; Krisis Venezuela; Ekuador; Kolombia

Pendahuluan

Proses globalisasi telah berkontribusi terhadap perubahan dan menurunnya otoritas kekuatan dan kedaulatan negara. Perubahan subyek dalam wilayah ilmu politik muncul pada pergantian abad XX dan abad XXI, di mana konsep kedaulatan nasional berhubungan dengan masalah globalisasi dan tata dunia baru (Grinin L. E., 2001). Menurut Thomas Friedman (dalam Ku dan Yoo 2013) globalisasi mengacu pada keterlibatan integrasi pasar yang tak terhindarkan, negara-bangsa dan teknologi sampai titik yang tidak pernah terjadi sebelumnya, yang menyebarkan kapitalis pasar bebas ke seluruh negara di dunia secara virtual. Akan tetapi lingkup globalisasi bukan hanya masalah liberalisasi ekonomi, namun juga termasuk perkembangan kerjasama politik, migrasi, komunikasi, efisiensi biaya transportasi percampuran masyarakat dan budaya secara global, serta menguatnya keberadaan masyarakat sipil global, yang mewakili kesempatan baru bagi individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan budaya yang melampaui otoritas negara (McGrew & Smith, 2005). Secara singkat, globalisasi mengacu pada berbagai proses integrasi ekonomi, politik, sosial, budaya yang melintasi batas negara.

Perjanjian Westphalia 1648 yang awalnya merupakan titik balik di mana loyalitas masyarakat diberikan kepada negara sebagai satu-satunya pemegang kekuasaan politik tertinggi dan mutlak akhirnya mengalami perubahan sejak globalisasi intensif terjadi pada awal abad ke 21. Awalnya dengan konsep negara-bangsa semua negara memiliki hak dan legalitas yang sama, tidak ada pembeda antara negara besar dan kecil, karena semuanya dianalogikan sebagai unit yang samayang disebut dengan model 'bola billiard' (Grinin L. E., 2007). Namun sejak adanya globalisasi, posisi Negara-negara tidak sama lagi. Konsep *sovereign nation-states* tersebut mulai goyah. Rosenau (1990) menyatakan bahwa sudah tiba era *post international politics*, dimana berbagai dimensi dalam kehidupan global akan lebih penting daripada sekedar hubungan politis antarnegara. Kedaulatan pasca-Westphalia ini ditandai dengan adanya denominasi mata uang; banyak orang yang memiliki kewarganegaraan ganda; perbatasan yang semakin tidak pasti karena arus migran dan pengungsi. Kejadian-kejadian tersebut dapat dipotret dan terjadi di berbagai negara di Amerika Latin melalui ALBA .

Untuk menjawab *pertanyaan penelitian* apakah integrasi yang ada pada negara di Amerika Latin / ALBA sudah bisa dikatakan mampu menjadi tolak ukur yang empiris bahwa sekarang ini, loyalitas harus diserahkan pada organisasi regional? *Thesis statement* penulis percaya bahwa globalisasi telah mengubah konsep negara, teritori, dan kedaulatan di mana globalisasi telah mengurangi kekuasaan dan kedaulatan negara yang digantikan oleh meningkatnya peran berbagai aktor baru dalam hubungan internasional seperti halnya adanya kerjasama regional supranasional dan sejenisnya. Menurut penulis integrasi Amerika Latin (ALBA) bisa dijadikan simbol bahwa di era kontemporer yang mencakup internasionalisme dan globalisasi yang kuat ini, adanya identitas kolektif dan deterritorialisasi kedaulatan semakin mendorong eksistensi dari paham regionalisme, dimana pemerintahan negara menyerahkan kedaulatannya dalam jumlah yang signifikan dengan harapan mampu menjaga harmoni dan kedudukan serta tingkat interdependensi di tingkat yang lebih tinggi dari sekedar domestik,

tetapi juga tetap tidak menghilangkan eksistensi dari pemerintahan negara masing-masing, yang dalam hal ini artinya integrasi ekonomi menguatkan otoritas Negara.

Guna menjawab pertanyaan penelitian, pada *preposisi pertama* penulis mencoba menilik pada letak kedaulatan di era globalisasi. Apabila di era Westphalia, kedaulatan berbentuk negara dan benar-benar dijaga, maka di era kontemporer ini, kedaulatan justru dengan sengaja dinegosiasikan oleh negara itu sendiri demi mendapatkan keuntungan dan mengeruk potensial tertentu. Hal tersebut dikenal dengan istilah *sovereignty bargains* atau tawar-menawar kedaulatan (Mattli, 2000). Contoh dari *sovereignty bargains* adalah integrasi yang terjadi di Amerika Latin (ALBA), di mana mengedepankan prinsip-prinsip saling menggenapi (bukan berkompetisi), solidaritas (bukan dominan), kerjasama (bukan eksploitasi), dan penghormatan kedaulatan rakyat (pengganti kekuatan organisasi), dan sebagai penyeimbang kerjasama kawasan yang telah ada (Ishmael, 2007). *bargain* sendiri dianggap sebagai alternatif kebangkitan kembali Negara yang lemah akibat globalisasi, karena regionalisasi masih menempatkan negara sebagai aktor utama. Penulis menganggap bahwa tawar-menawar kedaulatan di Amerika Latin (ALBA) masih menjadi hal yang faktual.

Sejalan dengan preposisi di atas maka akan sangat erat kaitannya jika mengacu pada teori *Regionalisme*, pada saat ini saling ketergantungan sangat terlihat jelas dalam tatanan hubungan internasional yang mana telah terjadi pergeseran paradigma. Dalam transisi ini, setelah Perang Dingin, Khun menyampaikannya lewat buku dengan judul “Struktur Revolusi Ilmiah” di mana penitikberatan pada waktu itu berada pada integrasi kawasan yang merupakan pondasi dari paradigma yang mana kepentingan kawasan adalah hal yang diprioritaskan dan hal yang menjanjikan terhadap kepentingan setiap negara di kawasan tersebut. Paradigma tersebut telah diejawantahkan sebagai bentuk kerja sama di kawasan regional di beberapa belahan bumi (Sitepu, 2011). Karya Winarno (2011) yang berjudul “Isu-isu Global Kontemporer” disebutkan bahwa adanya pengelompokan regional sebagai bentuk regionalisme yang didasarkan pada hubungan dagang dan finansial, budaya, letak geografi, komunikasi, saling ketergantungan, dan keanggotaan organisasi internasional (Winarno., 2014).

Sejalan dengan pendapat sebelumnya, Joseph S. Jr. Nye (1968), mengatakan bahwa *region internasional* merupakan perkumpulan negara-negara yang terhubung secara geografis dan adanya saling ketergantungan. Dengan adanya asumsi itu, (Keohane & Joseph S.Nye, 1975) berpendapat bahwa regionalisme mempunyai arti kawasan dalam formasi region. Pendapat Nye selanjutnya adalah regionalisme bisa dimengerti melalui pendekatan fisik, misalnya posisi geografis semua negara anggotanya, dan kesamaan sosiokultural.

Negara dimaknai sebagai aktor internasional, yang berfungsi sebagai media untuk berkomunikasi secara internasional dalam berbagai hal dan kepentingan yang berbeda-beda, sehingga dengan demikian adanya peranan negara mampu memberikan pedoman bertindak yang tepat pada satu situasi tertentu di lingkungan internasional. Negara Venezuela di bawah kepemimpinan Hugo Chavez, dimaknai juga sebagai aktor internasional. Venezuela sendiri menjalin dan turut serta dalam kerjasama regionalisme, salah satu organisasi internasional keanggotaan yang saat ini gencar dilakukan yakni ALBA (Aliansi Bolivaria untuk Bangsa-Bangsa Amerika Kami) yang merupakan bentuk reaksi dari situasi internasional yang muncul.

Sebagai organisasi regional di Amerika Latin, ALBA adalah organisasi sebagai bentuk kerja sama yang pemrakasanya adalah Hugo Chavez. Awal mulanya ALBA adalah bentuk respons beberapa negara di kawasan Amerika Latin atas *Free Trade Area of Americas*, atau FTAA. Sebagai sebuah organisasi kerjasama regional, ALBA dicanangkan dapat memberikan kemakmuran dan pemerataan pembangunan juga sebagai upaya membangun solidaritas, integrasi ekonomi politik kawasan Amerika Latin. Dalam hal ini, kerja sama antar negara di satu kawasan demi tercapainya tujuan kawasan bersama merupakan maksud utama memajukan regional. Dengan bergabung atau terbentuknya organisasi kawasan tersebut, beberapa negara mengembangkan bentuk kerja sama intra kawasan. Ini berarti bahwa setiap negara di suatu regional telah berbagi kekuasaan satu sama lain untuk mencapai maksud

bersama tanpa melepaskan sepenuhnya kedaulatan masing-masing negara. Hal ini merupakan langkah yang sangat strategis dalam beradaptasi dengan efek globalisasi di satu sisi mereduksi signifikan posisi negara secara individual.

Preposisi kedua dalam tulisan ini adalah transformasi eksistensi nasional menuju regionalism yang nantinya berujung pada pembentukan identitas supranasional. Didahului dengan bahasan nasionalisme yang menjadi paham demi terciptanya dan dipertahankannya negara berdaulat untuk mendapatkan kesatuan konsepsi persamaan identitas; supranasional lebih daripada itu. Supranasional dimaknai sebagai karakteristik organisasi atau aktivitas lintas batas geografi dan politik suatu negara (KBBI 2018). Dalam hal ini, adanya penyerahan kuasa dari setiap negara anggotanya kepada pemerintahan yang berada di atasnya.

Menurut Ferio Cerutti (1992, 152) setidaknya ada empat elemen yang bisa menggambarkan eksistensi dari identitas supranasional. Pertama, *interdependence* yaitu adanya *network of interrelations* dan mekanisme yang saling mengikat dunia secara bersama-sama ke tahapan yang tidak pernah dilalui, bukan hanya dunia ekonomi dan keuangan, pasokan energi dan makanan, tetapi juga teknologi dan komunikasi multimedia. Kedua, *normative universalism of human rights* yaitu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai prasyarat untuk dilakukannya demokrasi yang serius; adanya individualisme moral; dan juga adanya relevansi kewarganegaraan “yang bertumbuh” sebagai budaya politik dalam demokrasi. Ketiga, *global challenges* yaitu munculnya keadaan yang sangat menantang dengan efek yang mendunia, seperti adanya *self-annihilation of human kind* melalui perang nuklir. Keempat, *world order* yaitu berhubungan dengan institusionalisasi dengan adanya identitas bersama untuk menjaga stabilitas dan juga mengkodifikasi satu peraturan bersama agar mampu menyesuaikan tantangan global. Penulis beranggapan bahwa 4 elemen tersebut sudah ada dalam ALBA, meskipun untuk bisa dikategorikan dan beralih menjadi supranasional masih “sangat sulit”. penulis akan memberikan fakta empiris atau studi kasus di bawah ini.

Metode

Pada penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Peneliti mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Sedangkan penulis akan menggunakan sumber data sebagai acuan dalam penelitian ini. Sumber data adalah bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dan dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber arsip, dokumen resmi dan dokumen pribadi. Penulis juga menggunakan tipe penelitian deskriptif analitik dalam membuat penelitian mengenai Globalisasi Mengubah Konsep Negara, Teritori, Kedaulatan: Integrasi Alba Sebagai “*Sovereignty Counter-Balance*”. Penelitian ini berupaya untuk menjelaskan sebab terjadinya sebuah fenomena melalui keterkaitan hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Sehingga dapat ditemukan adanya hubungan integrasi ekonomi yang sangat ambisius dari negara-negara Amerika Latin dan Karibia dalam sovereignty ALBA juga keterkaitan lebih jauh dengan berbagai permasalahan isu kontemporer mengenai migran sebagai akibat dari krisis Venezuela.

Hasil Dan Pembahasan

1. Integrasi Ekonomi Politik sebagai Katalis Identitas Regional

Pada mulanya Cuba dan Venezuela memprakasai kerja sama regional *alternativa Bolivariana Para Las Americas* atau *Agreement for the Application of the Bolivarian Alternative of the Americas and the People's Trade Agreements*, yang disingkat ALBA. Pendeklarasian ALBA pada tanggal 28 April 2004 di Havana, Cuba (Baumann, 2008). Dalam mewujudkan kepentingan nasional, sebagai dasar dalam berasumsi adalah adanya tendensi setiap negara untuk mempergunakan sistem atau organisasi internasional. Oleh karena itu, selama negara-negara tersebut masih dapat melayani kepentingannya, mereka dapat membentuk kekuatan politik. Morales dan Chavez yang tertarik untuk menyuarakan

pertentangan terhadap Amerika Serikat, dan pasti akan melihat bahwa negara-negara lain akan lebih mendukung kepentingan ini. Sejak berdirinya, penyebab bertambahnya jumlah anggota ALBA akibat dari hasil pemilihan pemimpin di Amerika Latin yang berpaham prespektif sosialis. Negara yang menjadi anggot ALBA berjumlah sebelas, yaitu sesuai abjad, Antigua dan Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominika, Ekuador, Grenada, Nicaragua, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines dan Venezuela yang tersaji dalam berikut:



Gambar 1. Negara Anggota ALBA
(Sumber : albainfo.org)



Gambar 2. Peta Negara Anggota ALBA
(Sumber : www.polgeonow.com)

Negara-negara Amerika Latin menganggap ALBA sebagai pilihan lain untuk pengintegrasian finansial yang mantap dalam rangka merespon hadirnya FTAA sebagai salah satu bentuk neoliberal yang dihadirkan oleh Amerika Serikat. Sebagai pelopor ALBA, Venezuela telah menentukan opsi-opsi kerja sama dan juga menjalin pakta politik dan ekonomi yang kuat untuk bersaing dengan FTAA dan beberapa organisasi kapitalis bentukan Amerika Serikat. Pada keadaan tersebut, kehadiran Venezuela dan strateginya mempunyai pengaruh yang kuat dalam memainkan persekutuan politik dan ekonomi di kawasan Amerika Latin.

ALBA bertujuan membuat perubahan kawasan Amerika Latin secara mendasar agar mendapat keadilan dalam hak, memperoleh ilmu dan pengetahuan, lebih berperan dan mendukung. Maka dari itu, bisa dimengerti jika ALBA berperan sebagai keseluruhan proses yang bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan sosial, meningkatkan kualitas hidup, dan berperan serta secara efektif dalam masyarakat untuk menciptakan perbaikan di sektor ekonomi dan sosial. Dari hal ini, penulis setuju dan pandangan ini bisa dijadikan dasar argumentasi bahwa ada “katalis identitas”, dimana akhirnya integrasi menjadi semakin tinggi tingkatannya dan identitas bersama juga semakin kuat, lebih dari identitas nasional tetapi juga identitas regional yang tidak mengesampingkan teritori dan kedaulatan negara anggota secara semena-mena.

Secara stasis dan konsisten penulis menyusun beberapa fakta berikut yang mampu membuktikan bahwa ALBA bisa dikatakan integrasi ekonomi politik sekaligus katalis identitas regional yang berhasil diantaranya :

- a. Telekomunikasi : Dibuat pada tahun 2005 sebagai "penyeimbang" untuk CNN, TeleSUR adalah outlet berita yang berbahasa Spanyol dan berkantor pusat di Venezuela, penyandang dana utama didapat dengan kontribusi dari anggota lain. Siarannya mencapai luar Amerika Latin dan Karibia ke bagian Eropa dan Afrika.
- b. Perbankan dan Keuangan: Venezuela mendirikan Bank ALBA pada tahun 2008 dengan \$ 1 miliar modal. Mencari untuk melayani sebagai alternatif untuk IMF atau Bank Dunia, lembaga tidak memaksakan kondisi pinjaman. Bank mendukung produksi pertanian, kerjasama energi, dan telah menginvestasikan \$ 170 juta program sosial yang terkait dengan pendidikan, budaya, dan kesehatan. Selama KTT kesebelas ALBA pada tahun 2012, terjadi kesepakatan antar anggota dalam rangka berkontribusi cadangan devisa sebesar satu persen ke bank untuk mendanai proyek-proyek pembangunan. Pada KTT ke 7 bulan oktober tahun 2009 di Cochabamba Bolivia, melalui ALBA Hugo Chavez memperkenalkan *sucre* (*sistema unico de compensacion regional / unified system for regionalism compensation*) sebagai alat pertukaran ekonomi virtual yang akan digunakan untuk perdagangan antar anggota yang juga akan menghindari penggunaan dolar Amerika Serikat dan dari KTT tersebut maka di semua anggota ALBA menyetujui penggunaan *sucre*. Pada hari yang sama pemimpin Venezuela itu mendeklarasikan "*The Sucre*" sebagai suatu kebijakan finansial yang mandiri dan berdaulat yang pada saat ini akan disetujui supaya mampu diterapkan pada tahun 2010. Transaksi dilakukan antara bank sentral. Tahun ini, negara-negara anggota membuat 1.500 transaksi senilai 550 juta XSU(kode untuk *sucre*), atau \$ 670.000.000. Meskipun itu bukan anggota ALBA, Uruguay diminta masuk ke dalam sistem untuk menggunakan mata uang regional di bulan Maret 2013.
- c. Minyak: Pada tahun 2005, Chavez mendirikan Petrocaribe, sebuah blok perdagangan minyak di mana Venezuela memasok anggota Caribbean minyak dengan harga yang lebih rendah. Petrocaribe dan ALBA adalah entitas yang terpisah yang memiliki beberapa tumpang tindih dari negara anggota, tapi berencana untuk menjadi lebih dekat. Pada bulan Januari, pemerintah Venezuela mengumumkan rencana untuk sebuah "*zona ekonomi*" antara ALBA-TCP dan Petrocaribe. Tujuan zona yang diusulkan akan memajukan investasi, perdagangan, pariwisata, dan proyek-proyek pembangunan antara negara-negara anggota dari kedua kelompok.
- d. Program Sosial: Menurut sebuah pernyataan pers Venezuela resmi, Bank ALBA telah menginvestasikan \$ 170 juta program sosial. Inisiatif ini berkisar dari program pendidikan sekolah dasar di Bolivia, Dominika, dan Nikaragua untuk beasiswa untuk penelitian dan seni budaya (Barra, 2012).

Terlepas dari keberhasilan ALBA dari penjelasan diatas tidak menjadikan penanda bahwa selamanya negara yang tergabung dalam organisasi regional bahkan supranasional sekalipun menjadikan setiap negara akan merasa "aman" melalui studi kasus berikut penulis mencoba menganalisis hubungan antara ALBA dan kedaulatan domestik negara.

2. Krisis Domestik Menyebabkan Laju Migran di Venezuela

Pada bulan Mei 2017, ketika banyaknya korban selama protes terhadap rezim Nicolás Maduro di Venezuela, dan dengan lebih dari 130 terluka dan lebih dari 1.300 penangkapan, hal ini mendapatkan kecaman dari dunia internasional di antaranya Amerika Serikat dan beberapa negara wilayah itu. Selain krisis di Venezuela, jatuhnya ekonomi dan meningkatnya kekerasan kriminal dan politik juga terjadi Aliran migran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini menjadi permasalahan yang sulit dan sensitif untuk semua negara di kawasan ini. Cara alami untuk memperbaiki krisis migrasi ini adalah dengan mengatasi krisis kemanusiaan di Venezuela. Namun, meskipun upaya berulang kali oleh banyak pemerintah di wilayah tersebut

bahkan dari luar, rezim Venezuela selalu mengabaikan tawaran bantuan kemanusiaan bahkan lebih parahnya ditolak (Sullivan M. P., 2013).

Maduro dan rezimnya telah berulang kali membantahnya adanya krisis, Presiden Venezuela ini mengambil sikap tegas dengan menyalahkan media asing juga oposisi pemerintah untuk menyebarkan kebohongan tentang negara tersebut (Vyas & Dube, 2018). Tak beda dengan gaya kepemimpinan Chavez, pemerintahan Maduro juga menuduh oposisi dan imperialisme khususnya Amerika Serikat dan Kolombia sebagai penyebab kekacauan tersebut. Mereka mempertanyakan penyebab adanya krisis tersebut apakah dari paham sosialisme. Petinggi dan ahli sosialis menentang dengan pemikiran subjektif tersebut. Di saat yang sama, penjelasan yang objektif akan menguak kelemahan dalam kebijakan dan paham sosialis yang diadopsi Chavez dan terus diikuti oleh Maduro. Kesalahan ini merupakan penyebab runtuhnya sosialisme saat ini, sama seperti runtuhnya di masa sebelumnya, saat bencana kelaparan yang terjadi di Tiongkok tahun 1960-an di saat Mao Zedong berkuasa (Sullivan, 2013).

Permasalahan yang muncul semakin kompleks. Pemerintahan Venezuela yang menerapkan paham sosialisme saat itu dinilai salah karena telah menghabiskan cadangan devisa, terutama disebabkan salah kelola perekonomian yang abai terhadap manajemen ekonomi yang baik, diterbitkannya dan dicetak ulang mata uang baru, diikuti dengan kebijakan denominasi dengan pemangkasan nilai mata uang lima digit dari belakang. Kebanyakan barang diperoleh dengan mengimpor dari negara lain, yang mengakibatkan tidak seimbang pasokan barang dan berdampak tingginya inflasi. Di sisi lain, defisit juga diperbesar dengan adanya penganggaran untuk pembangunan infrastruktur. Situasi tersebut berlanjut sampai meninggalnya Chavez dan terpilihnya Maduro melalui pemilihan yang penuh kontroversi, hanya untuk meneruskan gaya kepemimpinan yang sosialis populis tersebut. Kemudian ada pergerakan protes mahasiswa bersama masyarakat yang menyebabkan Venezuela terdampak krisis multi dimensi. Aparat pemerintah yang represis, mismanajemen dan korupsi menyebabkan kekacauan dan berdampak gelombang pengungsi yang meninggalkan Venezuela. Gelombang pengungsi yang besar-besaran itu disebabkan oleh adanya konflik berkepanjangan di dalam negeri. Dengan ketidakberdayaan pemerintahan Maduro yang tak mampu mengurai krisis dan represis dalam negeri, mendorong penduduknya mengungsi ke negara lain demi mendapat kehidupan yang lebih baik. Hal ini tentu saja menyita perhatian dunia internasional, dan mendorong untuk mengetahui penyebab eksodus besar-besaran warganya ke negara lain, di mana diketahui Venezuela merupakan negara Amerika Latin yang dulunya makmur. Kemudian, apa dampak eskodus tersebut terhadap negara-negara tetangga? Permasalahan ini akan penulis jelaskan melalui studi kasus di bawah ini.

3. Burden Sharing dalam Hal Migrasi pada krisis Venezuela era Maduro



Gambar 3. Tujuan Migran Venezuela

IMF (2020) mempublikasikan *World Economic Outlook* yang menyatakan bahwa laju inflasi di Venezuela di tahun 2018 adalah lebih dari enam puluh lima ribu persen, dan diperkirakan di tahun 2020-2021 sebesar setengah juta persen. Tentu saja Venezuela sulit untuk mengurai hiperinflasi tersebut. Dampaknya dari hiperinflasi tersebut adalah pengungsian ke luar negeri. Reuters (2019) melansir bahwa Uni Eropa dan PBB telah melaporkan warga Venezuela sejak 2015 yang mengungsi mencapai lima juta penduduk (Cerra, 2016). Hiperinflasi, meningkatnya harga barang dan jasa, kenaikan tindak kriminal dan kekerasan sebagai dampak melemahnya sektor finansial Venezuela menyebabkan penduduknya demonstrasi secara massif. Salah satu dampaknya yaitu situasi yang tidak terkontrol dengan berbagai keributan terjadi di Venezuela. Hal ini di perburuk dari berbagai tekanan yang berpihak pada rezim oposisi yang tidak sejalan dengan kinerja Maduro, Presiden Venezuela saat ini.

Berdasar pemilu Venezuela tahun 2018, pihak-pihak menyatakan bahwa perubahan yang dialami oleh Venezuela adalah upaya dalam membenaran terhadap berkuasanya Maduro. Sementara itu kubu oposisi, Guaidó yang terpilih sebagai Ketua DPR Venezuela pada 5 Januari 2020 dinilai membuat perubahan yang progresif. Guaidó berinisiatif mengambil alih kekuasaan sebagai presiden sementara. Berdasarkan UU konstitusi Venezuela, dalam Pasal 223 yang mengatur bahwa jika presiden berhalangan menjalankan tugasnya atau melakukan tindakan inkonstitusional, dia bisa mengganti kepemimpinan presiden. Sampai pada saat ini Venezuela masih berada dititik terburuk sebagai sebuah negara yang dulunya sangat kaya dan Makmur, inilah krisis ekonomi memicu krisis kekuasaan yang hingga kini masih berlanjut (Guaidó, 2019).

Dampak buruk dari kebijakan yang diberlakukan rezim otoriter Presiden Nicolás Maduro sejak 2013 mendorong warga Venezuela untuk melarikan diri. Meskipun dulunya negara ini merupakan negara terkaya di Amerika Latin, pada kenyataannya sekarang Venezuela telah mengalami keruntuhan ekonomi dan kelembagaan yang masif. Hiperinflasi 1 juta persen, nilai mata uang yang semakin tidak berharga, Penurunan layanan sosial, juga kekurangan barang kebutuhan, termasuk makanan, obat-obatan, dan vaksin, sementara di satu sisi penindasan politik, korupsi, dan kekerasan semakin meluas sehingga menciptakan ketakutan dan keputusasaan bagi warga negaranya (John, 2018).

a. Ekuador

Mulanya arus migran dari Venezuela sudah terjadi sejak 2015, yang secara tidak langsung hal ini menandai krisis perpindahan terburuk di Amerika Latin dalam sejarah (Welsh, 2018). Dari 3,7 juta warga Venezuela yang diperkirakan tinggal di luar negeri, sekitar 3 juta—lebih dari 80 persen—berada di Amerika Latin dan Karibia (UNHCR, 2017).

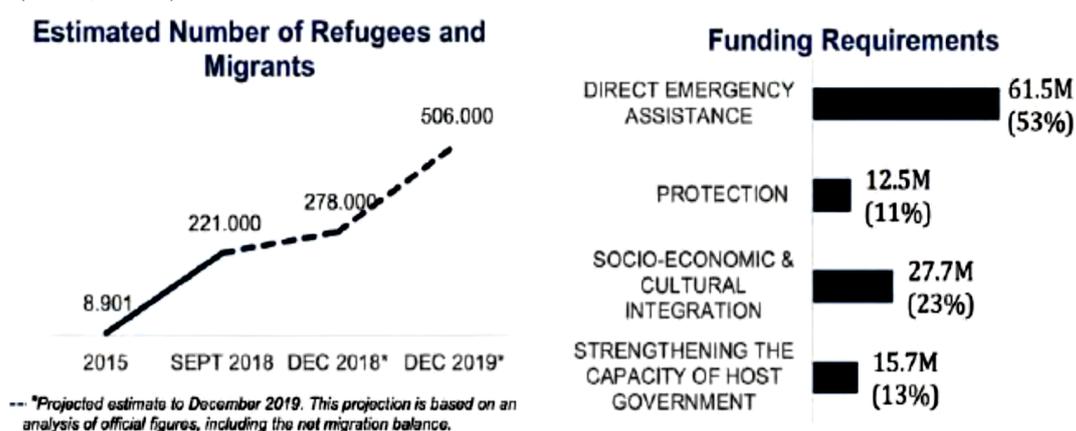
Pada Bulan September 2018, pemerintah wilayah Amerika Latin melakukan pertemuan pemerintah yang dihadiri sebelah negara dan bertemu pada 3–4 September 2018, bertemu di Quito, Ekuador dengan tujuan saling bertukar informasi dan mencari solusi sebagai upaya terbaik untuk menanggulangi jumlah migran Venezuela yang terus bertambah juga membahas situasi di Venezuela dan membuat tanggapan atas wilayah tersebut (Cancilleria, 2018). Dikenal sebagai "Proses Quito," pertemuan ini dirancang untuk mengatasi konsekuensi kemanusiaan kekacauan internal Venezuela, bukan hal-hal politik di masa depan. Pertemuan tersebut mengarah pada adopsi Deklarasi Quito tentang Mobilitas Manusia Warga Venezuela di Wilayah tersebut ("Quito I"), yang meletakkan dasar-dasar untuk tanggapan yang lebih terkoordinasi (Human, 2018). Pertemuan berikutnya di November 2018 ("Quito II") menghasilkan Rencana Aksi di mana beberapa negara tuan rumah yang berpartisipasi berkomitmen untuk memfasilitasi integrasi sosial dan ekonomi warga Venezuela.

Sejak 2015, sekitar 1,15 juta warga Venezuela telah tiba di Ekuador, dengan lebih dari setengahnya masuk pada tahun 2018 (UNHCR, "Global Focus." , 2018). Laporan UNHCR Februari 2019 menyatakan bahwa negara itu rata-rata melihat sekitar 2.000 kedatangan harian, dengan puncaknya mencapai 5.000, meskipun sebagian besar individu transit ke negara lain,

sekitar 221.000 Venezuela pengungsi dan migran tinggal di Ekuador per Maret 2018. Kedatangan begitu banyak dalam waktu singkat telah menegangkan kapasitas kelembagaan Ekuador. Bahkan, secara historis negara ini telah menjadi negara penerima pengungsi negara ini menjadi tuan rumah bagi sejumlah terbesar pengungsi di Amerika Latin, meskipun sebagian besar dari mereka menuju Kolombia. masuknya sejumlah warga Venezuela dengan demikian menciptakan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya (UNHCR, Refugees International meeting at the Embassy of Ecuador to the United States in Washington, D.C., 2019).

Selain itu, Ekuador kini bergeser dari transit menjadi negara tujuan. Sebelumnya, mayoritas warga Venezuela yang memasuki Ekuador sedang dalam perjalanan ke Peru, di mana mereka percaya bahwa mereka berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Namun, karena kehidupan bagi warga Venezuela telah terbukti semakin sulit di Peru, lebih banyak yang memilih untuk tinggal atau Kembali ke Ekuador. Persentase yang tersisa di Ekuador telah naik menjadi sekitar 26 % dalam beberapa bulan terakhir, naik dari 17 % pada akhir tahun 2018 (UNHCR, the Human Mobility chapter of the 2008 Ecuadorian Constitution, 2008).

Ekuador memiliki undang-undang hak asasi manusia, migrasi, dan suaka yang kuat. Konstitusi 2008-nya mengakui hak-hak individu untuk mencari suaka, serta prinsip kewarganegaraan universal, di mana orang asing di Ekuador diberikan hak dan tugas yang sama dengan warga negara (Cancilleria, 2018). Dengan demikian, pengungsi dan pendatang dengan status reguler memiliki hak untuk membebaskan layanan kesehatan dasar dan pendidikan. Konvensi PBB tahun 1951 telah diratifikasi oleh Ekuador yang berhubungan dengan pengungsian (Konvensi 1951) pada tahun 1958 dan 1967 Protokol pada tahun 1969 (UNHCR, The 1951 UN Refugee Convention defines a refugee as a person, 2016). Ini juga merupakan penandatanganan Deklarasi Cartagena regional 1984 tentang Pengungsi (Deklarasi Cartagena), yang secara lebih luas mendefinisikan pengungsi sebagai "warga yang telah mengungsi dari negaranya karena ada ancaman terhadap kehidupan, kebebasan dan keselamatan yang baik berasal dari tekanan asing, kekerasan, pertikaian domestik, pelanggaran hak maupun kondisi lain yang dengan serius meresahkan ketertiban umum. Definisi itu dimasukkan ke dalam kerangka hukum nasional Ekuador dan tetap hadir dalam Undang-Undang tentang Mobilitas Manusia (Hukum Mobilitas Manusia), disahkan di bawah Presiden Lenín Moreno pada tahun 2017 (OAS, 1984).



Gambar 4. Jumlah Kedatangan Migran Ke Ekuador

Dari Gambar di atas terjadi peningkatan secara efisien dalam jumlah kedatangan pengungsi dan migran dari Venezuela di Ekuador sehingga hal ini merupakan tantangan besar bagi pemerintah Ekuador menanggapi situasi yang sedang berlangsung. Sekitar 806.000 kedatangan pengungsi dan migran dari Venezuela dari Januari hingga Oktober 2018, dibandingkan dengan 288.000 pada 2017. Ekuador adalah negara transit dan tujuan bagi para

pengungsi dan migran dari Venezuela dan terbesar kedua setelah Kolombia. Para migran yang memasuki negara itu secara teratur pada 2018, diperkirakan 83 persen (671.000) sedang transit di Peru dan tujuan lain, sedangkan 17 persen (135.000) tetap di Ekuador. Ini membawa jumlah total pengungsi dan migran dari Venezuela ke sekitar 221.000 di dalam negeri pada September 2018 (UNHCR, Refugees International meeting at the Embassy of Ecuador to the United States in Washington, D.C., 2019).

Satu hal terpenting yang menjadi tantangan bagi rakyat Venezuela adalah memilih untuk tetap tinggal Ekuador adalah akses ke status reguler. Meskipun mereka memasuki negara melalui reguler berarti mendapatkan visa sementara (turis) hingga 180 hari, ini tidak memberikan mereka hak untuk bekerja. Setelah di negara itu, mereka dapat mengakses sementara dan kemudian menjadi permanen untuk fasilitas tempat tinggal. Namun, dokumen yang diperlukan untuk mengajukan permohonan Izin tinggal seringkali sulit diperoleh bagi rakyat Venezuela, dan biayanya tinggi.

Mereka yang tidak dapat menghasilkan dokumen-dokumen ini atau menutupi biaya akan menemukan diri mereka sendiri dalam situasi tidak teratur ketika visa mereka kedaluwarsa. Dengan demikian, mereka menghadapi hal tertentu tantangan, termasuk akses yang terbatas ke layanan dasar dan kurangnya peluang yang membangkitkan semangat serta paparan yang lebih besar terhadap risiko perlindungan, seperti sebagai perdagangan manusia, eksploitasi dan pelecehan.

Akses ke suaka adalah hal lain tantangan yang dihadapi pada awalnya, meskipun ini meningkat secara progresif menjelang akhir 2018. Namun, sistem suaka, awalnya dimaksudkan untuk mengatasi sekitar 5.000 hingga 6.000 klaim setahun, tetap tidak cukup untuk mengatasi sejumlah besar kedatangan (UNHCR, "Global Focus." , 2018). Sekalipun Ekuador telah memberikan fasilitas untuk Migran Venezuela dengan Funding di beberapa bidang menurut penulis belum menjadi tolak ukur yang dapat menjadikan negara ini dapat sepenuhnya membantu negara koleganya tersebut namun jika dilihat dari sisi keanggotaan ALBA Ekuador berhasil menerapkan apa upaya *burden sharing* itu sendiri.

b. Kolombia

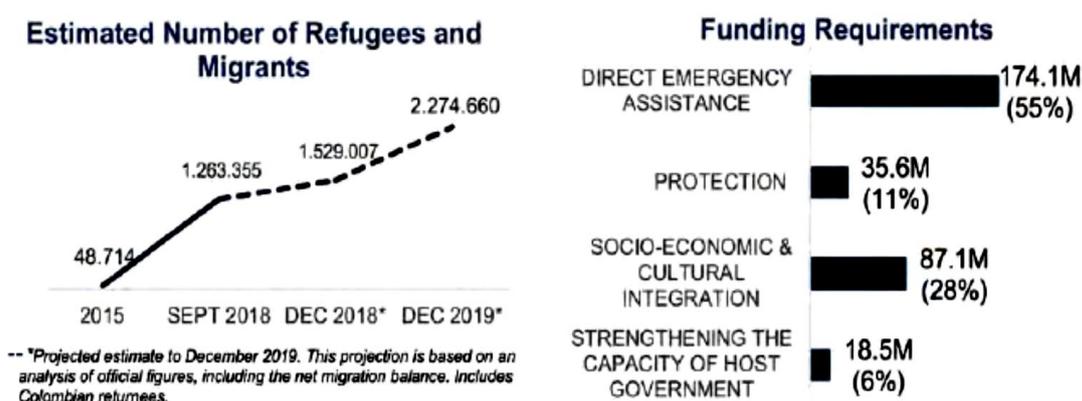
Perbatasan antara Kolombia dan Venezuela merupakan perbatasan negara yang paling dinamis di Kawasan Amerika Latin dan Karibia. Aliran migrasi besar telah melewati perbatasan ini karena komplikasi muncul di Kolombia dan Venezuela selama beberapa tahun terakhir. Hal ini dipandang sebagai perbatasan kritis, dipengaruhi oleh banyak krisis ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang dihadapi oleh kedua negara. Migrasi mengalir melalui ini perbatasan bersama telah berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada kondisi kehidupan di satu negara telah berfungsi sebagai insentif untuk pindah ke negara lain. Dengan demikian, perbatasan didefinisikan oleh dua aliran migrasi di kedua arah. Pertama, antara 1970 dan 2014 (La Opinión, 2016), konflik bersenjata di dalam negeri negara Kolombia dan *booming* minyak di Venezuela menyebabkan aliran migrasi besar dari Kolombia ke Venezuela. Namun, bahkan ketika media milik pemerintah di Venezuela mengklaim angka yang lebih tinggi (Ramírez S. R., 2015), statistik yang lebih realistis menunjukkan bahwa setidaknya satu setengah juta orang Kolombia mencari perlindungan dan alternatif ekonomi di Venezuela (Centro Nacional de Memoria Historica). Di sisi lain, dari 2015 hingga 2017, arah aliran migrasi mengalami perubahan (Migración, Dinámica Migratoria Colombia-Venezuela, 2018).

Secara tradisional, dinamika migrasi di Amerika ditandai dengan pola intra dan ekstra-regional. Dalam beberapa tahun terakhir, Venezuela telah melihat perubahan dalam proses migrasi dan alirannya ke tujuan tradisional telah meningkat, serta tujuan baru di kawasan dan dunia. Untuk tahun 2015, 695.551 warga Venezuela dilaporkan tinggal di luar negara mereka. Pada tahun 2017, jumlahnya naik menjadi 2.328.949 (IOM, 2018) dan pada 2019 (pembaruan terakhir adalah pada 6 Juni) jumlah ini naik menjadi sekitar empat juta (Migración, Dinámica Migratoria Colombia-Venezuela, 2018).

Saat ini, ada arus dominan migran dari Venezuela ke Kolombia, termasuk Kolombia yang kembali ke negara mereka dan warga Venezuela yang melintasi perbatasan, untuk memantapkan diri sementara, permanen, atau sebagai pemberhentian pertama sebagai bagian dari perjalanan yang lebih lama ke negara-negara Amerika Selatan lainnya seperti Ekuador, Peru, Chili, atau Argentina. Perbatasan antara Kolombia dan Venezuela memiliki panjang 2.219 kilometer, yang menjadikannya yang terpanjang dan paling penting bagi kedua negara. Ini merupakan tantangan geopolitik penting untuk migrasi formal dan informal di kedua sisi perbatasan. Saat ini, Negara Kolombia sebagai republik kesatuan dan terdesentralisasi yang terdiri dari 32 wilayah (disebut departamentos) di mana 7 berbagi perbatasan dengan Venezuela, yakni di Arauca, Boyacá, César, Guainía, Guajira, Norte de Santander, dan Vichada. Negara Venezuela merupakan pemerintahan federal dengan nama aslinya adalah República Bolivariana de Venezuela yang mempunyai negara bagian sebanyak 23. Empat dari negara bagian tersebut berbagi perbatasan dengan Kolombia, yakni Zulia, Táchira, Apure, dan Amazonas (Colombia J.-C. S., 2016).

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Venezuela telah menyebabkan krisis kemanusiaan, yang terlihat tidak hanya pada eksodus besar-besaran yang dimulai pada tahun 2015 tetapi juga dalam peningkatan protes sosial. Observatorium Venezuela untuk Konflik Sosial (2018) melaporkan 2.163 protes pada Juli 2018, rata-rata 72 protes per hari. Protes ini disebabkan oleh pelanggaran hak ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Ada juga keluhan tentang hak kerja di sektor kesehatan, pendidikan, listrik, dan telekomunikasi, serta penolakan kekurangan layanan publik dasar seperti air minum, listrik, gas alam, dan akses ke makanan dan obat-obatan. Secara sosial, krisis ekonomi yang parah ini telah menyebabkan kelangkaan pangan yang menyebabkan hampir 300.000 anak-anak di tepi kematian karena kekurangan gizi. Rata-rata warga Venezuela telah kehilangan 10 kilogram pasokan makanan dalam setahun terakhir karena kekurangan makanan (Rendon, 2018).

Sebagai akibat dari krisis Venezuela, kriminalitas telah meningkat. Menurut laporan Violence Venezuelan Observatory (2018) 2017, 64% kejahatan tidak dilaporkan karena kurangnya kepercayaan pada sistem peradilan. Pada tahun yang sama, ada tingkat 89 pembunuhan per 100.000 orang, dengan total 26.616 korban. Tingkat tinggi ini disebabkan oleh penurunan atau berkurangnya kualitas hidup di antara rakyat Venezuela dan kesulitan untuk mengakses yang berkaitan dengan hak azasi manusia karena berbenturan dengan aturan hukum, konflik sosial, dan keadaan yang sangat yang sangat tidak menguntungkan.



Gambar 5. Kedatangan Migran ke Columbia

Dampak arus keluar pengungsi dan migran dari Venezuela dirasakan paling tajam di Kolombia. Melintasi perbatasan umum 2.200 kilometer dengan tujuh jalur formal dan Ratusan titik persimpangan informal, Kolombia telah menerima lebih dari 50 persen pengungsi dan migran dari Venezuela, termasuk mereka yang tetap di negara itu serta mereka yang transit melalui negara untuk pergerakan selanjutnya. Kolombia juga menerima sejumlah besar warga

negaranya yang kembali dari Venezuela, beberapa di antaranya mereka telah tinggal di Venezuela selama beberapa dekade.

Situasi di Kolombia memang kompleks, dengan berbagai jenis perpindahan populasi yang terjadi secara bersamaan, termasuk gerakan pendular di area perbatasan (Migración, Dinámica Migratoria Colombia-Venezuela, 2018). Kedatangan pengungsi dan migran dari Venezuela ke Kolombia telah terjadi peningkatan secara masif pada akhir-akhir ini. Jumlah mereka yang tinggal di negara itu meningkat dari kurang dari 39.000 pada akhir 2015, menjadi 1.032.000 pada akhir September 2018, meningkat hampir 2.550 persen. Demikian pula, jumlah orang Venezuela yang transit melalui Kolombia menuju Ekuador dan selanjutnya meningkat dari 14.000 pada 2015, menjadi 511.000 dalam sembilan bulan pertama tahun 2018, meningkat 3.550 persen. Tambahan, ada lebih dari 300.000 pengungsi Kolombia, dengan banyak dari mereka membutuhkan dukungan untuk inklusi sosial-ekonomi dan reintegrasi yang aman.

Untuk permasalahan ini Pemerintah Kolombia telah mengambil langkah-langkah yang tepat untuk merespons untuk situasi dan telah meminta mitra kemanusiaan dan internasional masyarakat untuk mendukung upayanya. Pada 2017, Kolombia membuat Izin Tinggal Khusus (PEP, dengan akronimnya dalam bahasa Spanyol), yang diuntungkan oleh Venezuela yang masuk titik perbatasan formal, dengan total 181.000 dikeluarkan pada Februari 2018. Antara April dan Juni di tahun yang sama, otoritas nasional mendaftarkan lebih dari 442.000 migran Venezuela yang tidak memiliki dokumen resmi di negara itu melalui yang terbesar dan tercepat proses registrasi dalam sejarahnya (proses dikenal dengan singkatan Spanyol, RAMV). Mereka yang terdaftar melalui RAMV diberi kesempatan untuk mengatur statusnya dengan memperoleh PEP. Dalam kebijakannya PEP memungkinkan orang-orang ini untuk tetap tinggal di Kolombia hingga dua tahun dengan akses ke hak-hak dasar, termasuk pekerjaan, kesehatan, dan pendidikan. Selain telah memberikan PEP kepada lebih dari 415.000 Venezuela pada akhir tahun September 2018, angka yang bisa mencapai sekitar 620.000 pada akhir tahun.

Kolombia juga telah membuka dua periode untuk permohonan Border Mobility Cards (TMF -oleh akronimnya dalam bahasa Spanyol), sebuah izin yang dipegang oleh sekitar 1,5 juta rakyat Venezuela pada November 2018, yang memungkinkan mereka memasuki Kolombia hingga tujuh hari. Sebagai bentuk perluasan progresif hak-hak dasar dan penyediaan layanan dasar ke Venezuela, seperti layanan kesehatan darurat dan sekolah dasar, juga mengalami percepatan pada tahun 2018. Anggota platform koordinasi nasional (the Inter-Agency Mixed Migration Flows Group - GIFMM, dalam bahasa Spanyol), yang dipimpin oleh the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) serta terdiri dari 38 badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Non-Pemerintah Organisasi (LSM) dan Gerakan Palang Merah, telah meningkatkan operasinya ke menanggapi meningkatnya kebutuhan pengungsi dan migran dari Venezuela, termasuk orang Kolombia yang ingin kembali. Upaya ini berangkat sebagai bentuk dari tindakan tanggap darurat hingga pemenuhan kebutuhan kemanusiaan, dasar dan perlindungan, serta tindakan untuk mempromosikan integrasi, kohesi sosial, dan memperkuat kapasitas pemerintah.

Ada fenomena menarik yang penulis temukan disini jika kita melihat walaupun ada “*kecenderungan*” untuk menutup perbatasan dan penolakan dari arus masuk pengungsi di negara-negara anggota, terlebih di Kolombia yang notabennya bukan anggota. Bagaimanapun juga ALBA mencoba adil untuk membagi bebannya, Terlihat dari cara mengklasifikasikan mekanisme distribusi berdasarkan dua kriteria: (1) *Justice-based system*, membagi berdasar pada indikator statis seperti GDP negara penerima, populasi, hingga ukuran wilayah; sebaliknya (2) *Outcome-based system*, membagi berdasar konsekuensi dari menampung pengungsi atau pencari suaka, misalnya, dampak penerimaan dan bantuan pada hubungan antaretnik atau keamanan, serta pada standar perlindungan dan bantuan yang diterima oleh pengungsi dan para pencari pencari suaka (Migración, Dinámica Migratoria Colombia-Venezuela, 2018).

Kesimpulan

Pada akhirnya krisis yang terjadi di Venezuela menghasilkan sebuah skenario yang memaksa negara ini untuk bergantung pada dukungan dari luar baik itu negara kawasan maupun negara asing. Dengan demikian, sangat tidak mungkin krisis ekonomi tidak akan mempengaruhi negara-negara lain di dalam kawasan. Begitupun dampak yang kemudian diterima oleh Ekuador dan Kolombia sebagai jiran yang ikut terdampak dengan segala permasalahan. Namun, pemulihan internal Venezuela khususnya pada sektor ekonomi akan bergantung pada modifikasi Pemerintah atas blokadanya, kebijakan sanksi, serta kebijakan ekonominya juga dukungan negara-negara kawasan. Membahas *movement of people* dan hal sosial, tak menutup adanya celah-celah dalam integrasi. Tetapi bagi penulis, ALBA bisa dijadikan contoh bagaimana organisasi internasional / regional mampu menyelesaikan berbagai permasalahan, bahkan menjaga harmoni di antara negara-negara anggota dengan menggaungkan pembuatan kebijakan kolektif. Dimulai dengan adanya *sovereignty bargains* hingga akhirnya adanya identitas regional dan bahkan tidak menutup kemungkinan bergerak menuju supranasional, menunjukkan bahwa globalisasi masih tetap mempertahankan adanya teritori, tetapi penulis melihat adanya urgensi untuk meningkatkannya pada level *advanced* yakni memperoleh internasionalisme melalui organisasi. Sehingga, loyalitas harus diberikan pada organisasi supranasional. Karena berdasarkan fakta empiris yang telah penulis jabarkan, ALBA mampu mencapai integrasi yang tinggi dan secara mau tidak mau akan memberikan katalis identitas yakni identitas Masyarakat Amerika Latin dan Karibia, di mana akan semakin memperkuat relasi dan menyatukan pandangan dalam menghadapi tatanan global yang begitu dinamis. Sekalipun respon Ekuador dan terutama Kolombia dinilai cenderung melakukan penolakan terhadap permasalahan Venezuela.

Daftar Pustaka

- Barra, X. D. (2012). *From ALBA to CELAC Toward "Another Integration"?* NACLA Report on the Americas. Vol. 45, No. 2.
- Baumann, R. (2008). *Integration in Latin America – Trends and Challenges*. ECLAC . . Retrieved maret 25, 2021, from cepal.org: Retrieved from <http://www.cepal.org>
- Cancilleria. (2018, September 3 and 4). *Declaration of Quito on Human Mobility of Venezuelan Citizen in The Region*. Retrieved from https://www.cancilleria.gob.ec:https://www..gob.ec/wp-content/uploads/2018/09/declaracion_de_quito_en.pdf
- Cerra, V. (2016). Inflation and the Black Market Exchange Rate in a Repressed Market: A Model of Venezuela. . *IMF Working Paper*, 1 – 49.
- Colombia, J.-C. S. (2016). *Situación Frontera Colombo Venezolana*. Bogotá, DC: JRS-Colombia. *JRS-COL*.
- Colombia, M. (2018). Retrieved 10 15, 2019, from <http://www.migracioncolombia.gov.co>.
- De La Barra, X. a. (2012). *From ALBA to CELAC Toward "Another Integration"?* NACLA Report on the Americas. Vol. 45, No. 2.
- Ecuador, O. L. (2017). *Section III—Refugee Status, Art. 98. Organic Law on Human Mobility of Ecuador, Supplement Official Registry 938 dated*. Retrieved from <https://www.refworld.org/docid/5bc70a384.html>.
- Ecuador, T. G. (2018). Quito: <http://servicios.turismo.gob.ec>.
- Grinin, L. E. (2001). *State Sovereignty in the Age of Globalization: Will it Survive? Globalistics and Globalization Studies*. Moskow: ISCE Publishing. .
- Grinin, L. E. (2001). *State Sovereignty in the Age of Globalization: Will it Survive? Globalistics and Globalization Studies*. Moskow: ISCE Publishing.
- Grinin, L. E. (2007). *State and Historical Process. The Evolution of the Statehood: From an Early to a Mature State*. Moscow: KomKniga/URSS. In Russian.
- Guidó, J. (2019, march 30). *Venezuela's Interim President*. Retrieved from <https://www.csis.org>

- Human, M. M. (2018, September 4). "Noticias: Declaración de Quito sobre Movilidad Humana de ciudadanos venezolanos en la Región,". Retrieved from <https://www.cancilleria.gob>.
- IOM. (2018). Tendencias migratorias en Las Américas: República Bolivariana de Venezuela. *International Organization for Migration (IOM)*.
- Ishmael, O. (2007). "South American Resistance to IMF and World Bank." *Guyana Journal*.
- John, M. (2018). Venezuelan economic crisis: crossing Latin American and Caribbean borders. *Journal Migration and Development*, 8 (3), 1 - 11.
- Keohane, R., & Joseph S. Nye, J. (1975). "International Interdependence and Integration", Fred I. Greenstein (ed), *International Politics Handbook of Political Science*, Vol. 8. California: Addison-Wesley Publishing Company.
- Mattli, W. (2000). Sovereignty Bargains in Regional Integration. *International Studies Review*, 149-180.
- McGrew, A. (2005). "Globalization and Global Politics". *J. Baylis and S. Smith The Globalization of World Politics, 3rd Edition*.
- McGrew, A. J., & Smith, S. (2005). "Globalization and Global Politics. *The Globalization of World Politics, 3rd Edition. (Oxford UP)*.
- Nye, J. S. (1968). *International Regionalism*. Boston: Little Brown and Company.
- OAS. (1984, 11 22). "Cartagena Declaration on Refugees, Colloquium on the International Protection of Refugees in Central America, Mexico and Panama. Retrieved from https://www.oas.org/dil/1984_cartagena_declaration_on_refugees.pdf
- Ramírez, S. R. (2015). Flujo migratorio de colombianos a Venezuela: las cifras cuentan. <http://www.urosario.edu.co>.
- Ramírez, S. R. (2015). *Flujo migratorio de colombianos a Venezuela: las cifras cuentan*. Retrieved April 7, 2021, from <http://www.urosario.edu.co>.
- Rendon, M. &. (2018). Venezuela's Crisis is now a regional humanitarian disaster. Center for Strategic and International Studies, CSIS. *CSIS*.
- Sitepu, A. (2011). *Konsep integrasi regionalism dalam studi hubungan internasional*. Medan: Graha Ilmu.
- Sullivan, M. P. (2013). Hugo Chávez's Death: Implications for Venezuela and U.S. Relations. *Congressional research service*.
- Sullivan, M. P. (2013). Hugo Chávez's Death: Implications for Venezuela and U.S. Relations. *Congressional research service*.
- UNHCR. (2008). the Human Mobility chapter of the 2008 Ecuadorian Constitution. *Article 41*.
- UNHCR. (2016). *The 1951 UN Refugee Convention defines a refugee as a person*. Retrieved from "well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.": <https://www.unhcr.org/protection/basic/3b66c2aa10/convention-protocol-relating-status-refugees.html>.
- UNHCR. (2017). *UNHCR, "Latin America and the Caribbean."*
- UNHCR. (2018). "Global Focus." . 1-5.
- UNHCR. (2019). *Refugees International meeting at the Embassy of Ecuador to the United States in Washington, D.C.* Washington, D.C.: UNHCR.
- Vyas, K., & Dube, R. (2018). "Venezuelans Die as Maduro Government Refuses Medical Aid". " *The Wall Street Journal*".
- Welsh, T. (2018). "Venezuela Crisis Is 'On the Scale of Syria,' UNHCR says,". <https://www.devex.com>, 1.
- Winarno, P. B. (2011). *Isu-isu Global Kontemporer*. Jakarta : CAPS.
- Winarno., B. (2014). *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS